

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, setiap daerah pada umumnya menempatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sebagai tujuan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marcal et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan atau hasil produksi per kapita yang terjadi dalam periode waktu tertentu, yang umumnya diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) (Utami, 2020).

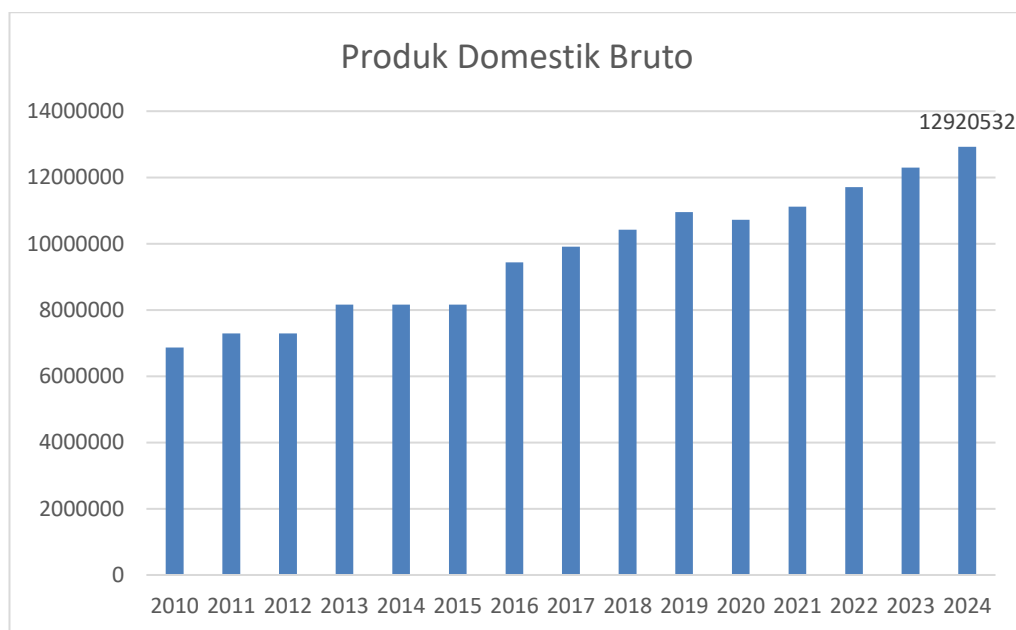
PDB mencerminkan tingkat kemampuan berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan output berupa barang dan jasa. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami perkembangan yang positif apabila nilai PDB menunjukkan peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun (Yuniarti et al., 2020). Peningkatan tersebut menggambarkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh peningkatan kuantitas serta kualitas faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya lainnya.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah perekonomian selama periode waktu tertentu (Anindita et al., 2021). Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mencakup seluruh kegiatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dengan

memanfaatkan faktor-faktor produksi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri selama digunakan di wilayah tersebut.

PDB mengukur total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, baik milik domestik maupun asing, sehingga lebih menekankan pada lokasi kegiatan ekonomi daripada asal kepemilikan faktor produksi. Selain itu, PDB mencakup berbagai sektor ekonomi dan digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kinerja serta pertumbuhan ekonomi suatu negara (Syahputra, 2017). Dengan demikian, PDB menjadi indikator yang penting dalam menggambarkan kinerja ekonomi serta tingkat perkembangan aktivitas produksi dalam suatu perekonomian.

Gambar 1. 1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, 2010–2024 (Triliun Rupiah)



Sumber : (Bps Indonesia, data diolah)

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan selama periode 2010–2024, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia secara umum mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, pertumbuhan

tersebut sempat mengalami penurunan tajam pada saat terjadinya pandemi COVID- 19. Pada tahun 2011, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,17% dibandingkan tahun 2010, yaitu meningkat dari Rp6.864.133 miliar menjadi Rp7.287.635,3 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat sebesar 11,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 15,67% dibandingkan tahun 2015, dengan nilai PDB meningkat dari Rp8.156.497,8 miliar menjadi Rp9.434.613,4 miliar.

Memasuki periode 2017 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dengan capaian masing-masing sebesar 5,07%, 5,17%, dan 5,03%. Namun pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Setelah periode kontraksi tersebut, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,71%, kemudian meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023. Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan kembali meningkat dari Rp12.301.394 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp12.920.532 miliar pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 5,03%. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi tekanan eksternal. Kemampuan untuk kembali tumbuh setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang berkesinambungan serta kondisi makroekonomi yang relatif stabil dalam jangka panjang.

Salah satu faktor yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam mendorong serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi (Safitri et al., 2025). Investasi menjadi motor penggerak aktivitas perekonomian karena melalui kegiatan penanaman modal, berbagai sektor usaha dapat berkembang dan memperluas kapasitas produksinya. Investasi dilakukan pada berbagai jenis perusahaan dan sektor industri dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau imbal hasil yang optimal, baik bagi investor domestik maupun investor asing (Apriliansah, 2024). Dengan adanya investasi, terjadi peningkatan aktivitas produksi, perluasan lapangan kerja, serta perputaran ekonomi yang lebih dinamis di berbagai wilayah.

Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai kegiatan pengeluaran atau pembelian barang modal yang digunakan untuk kepentingan produksi di masa yang akan datang (Hayati, 2016). Barang-barang tersebut tidak langsung dikonsumsi, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui proses ini, investasi berfungsi sebagai sarana untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Dalam praktiknya, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu investasi asing dan investasi domestik (Kambono & Marpaung, 2020). Di Indonesia, kegiatan investasi mencakup penanaman modal swasta yang berasal dari luar negeri yang dikenal sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) serta penanaman modal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Hidayat, 2020). Selain investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, terdapat pula investasi pemerintah yang difokuskan pada penyediaan

berbagai barang dan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sarana transportasi. Investasi pemerintah ini berperan penting dalam menciptakan fondasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Investasi berkaitan erat dengan proses akumulasi modal (capital formation), yaitu peningkatan stok barang modal seperti mesin, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Peningkatan akumulasi modal tersebut akan memperbesar kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga berdampak pada peningkatan output nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, semakin besar nilai investasi yang masuk, baik melalui PMDN maupun PMA, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai (MUSDALIFAH, 2025).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional karena berasal dari sumber daya domestik. PMDN mencerminkan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri terhadap kondisi perekonomian, serta menunjukkan kemampuan internal dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Selain itu, PMDN cenderung lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor eksternal global, sehingga berperan sebagai penopang utama dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan kontribusi tambahan yang tidak kalah penting, terutama dalam hal transfer teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta perluasan akses pasar internasional. PMA juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alih pengetahuan dan keterampilan. Masuknya investasi asing

dapat mempercepat pembangunan sektor-sektor strategis serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional di tingkat global (Nugroho et al., 2025).

Lebih lanjut, kombinasi antara PMDN dan PMA dapat menciptakan sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. PMDN berperan sebagai fondasi kekuatan ekonomi domestik, sementara PMA memperkuat melalui tambahan modal, teknologi, dan jaringan global. Oleh karena itu, peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Investasi Indonesia tahun 2010-2024

Tahun	PMDN (Miliar Rp)	PMA (Juta USD)	PMA (Miliar Rp)	Total Investasi (Miliar Rp)
2010	60.626,3	16.214,8	227.007,2	287.633,5
2011	76.000,7	19.474,5	272.643,0	348.643,7
2012	92.182,0	24.564,7	343.905,8	436.087,8
2013	128.150,6	28.617,5	400.645,0	528.795,6
2014	156.126,3	28.529,7	399.415,8	555.542,1
2015	179.465,9	29.275,9	409.862,6	589.328,5
2016	216.230,8	28.964,1	405.497,4	621.728,2
2017	262.350,5	32.239,8	451.357,2	713.707,7
2018	328.604,9	29.307,9	410.310,2	738.915,5
2019	386.498,4	28.208,8	394.923,2	781.421,6
2020	413.535,5	28.666,3	401.328,2	814.863,7
2021	447.063,6	31.093,1	435.303,4	882.367,0
2022	552.769,0	45.605,0	638.470,0	1.191.239,0
2023	674.923,4	50.267,5	703.745,0	1.378.668,4
2024	814.017,7	60.014,0	840.196,0	1.654.213,7

Sumber: (Bps Indonesia, data diolah)

Berdasarkan tabel realisasi investasi Indonesia yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

menunjukkan bahwa secara umum investasi di Indonesia mengalami tren peningkatan selama periode 2010–2023. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor riil. Berdasarkan data pada tabel 1.2 nilai PMDN meningkat secara signifikan dari Rp60.626,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp674.923,4 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi investor domestik dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Sementara itu, PMA yang semula sebesar 16.214,8 juta USD pada tahun 2010 (setara Rp227.007,2 miliar dengan asumsi kurs Rp14.000/USD), meningkat menjadi 50.267,5 juta USD pada tahun 2023 (setara Rp703.745 miliar). Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya minat investor asing terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca pandemi. Secara total, investasi (PMDN dan PMA dalam rupiah) mengalami peningkatan dari Rp287.633,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.378.668,4 miliar pada tahun 2023. Peningkatan paling signifikan terlihat pada periode 2021–2023, yang menunjukkan adanya percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Meskipun pada periode 2014–2016 dan 2018–2020 pertumbuhan PMA cenderung berfluktuasi, PMDN tetap menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi domestik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pembentukan modal ketika investasi asing mengalami perlambatan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, memiliki peran yang sangat

penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Peningkatan investasi berpotensi mendorong pertumbuhan output nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis (Agma, 2025). Oleh karena itu, analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi investasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Selain investasi, tenaga kerja juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tenaga kerja tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari tingkat partisipasinya dalam kegiatan ekonomi yang diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Secara teoritis, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menentukan tingkat output suatu perekonomian. Semakin tinggi partisipasi tenaga kerja, maka semakin besar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan karena lebih banyak sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa output nasional dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas tenaga kerja (Tribilianti, 2025).

Tingginya TPAK mencerminkan optimalnya pemanfaatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya TPAK menunjukkan adanya tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tenaga kerja juga berperan dalam meningkatkan permintaan agregat melalui pendapatan yang diperoleh dan digunakan untuk konsumsi.

Dengan demikian, TPAK memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi peningkatan kapasitas produksi maupun permintaan agregat. Oleh karena itu, variabel TPAK menjadi penting untuk dianalisis sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia (%)
Tahun 2010-2023



Sumber: (Bps Indonesia, data diolah)

Terlihat Pada awal periode pengamatan, TPAK tercatat sebesar 67,34% pada tahun 2010, kemudian mengalami penurunan menjadi 66,56% pada tahun 2011. Selanjutnya, hingga tahun 2014 nilai TPAK cenderung berada pada kondisi relatif stabil dengan fluktuasi terbatas di sekitar angka 66,60%. Memasuki periode 2015 hingga 2019, TPAK menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten, dari 67,22% pada tahun 2015 hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 69,32% pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan TPAK menjadi masing-masing 67,77% dan 67,51%. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan terhadap tingkat partisipasi penduduk dalam pasar kerja pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 TPAK kembali mengalami peningkatan menjadi 68,63% dan 69,11%, yang menunjukkan adanya proses pemulihan partisipasi angkatan kerja Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kembali mengalami peningkatan dari 69,11% pada tahun 2023 menjadi 69,20% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi mengalami kecenderungan meningkat dalam jangka panjang, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa periode tertentu. Temuan ini mencerminkan dinamika keterlibatan penduduk dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta faktor eksternal lainnya.

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah beserta para perumus kebijakan publik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjamin perlindungan hak milik serta mewujudkan stabilitas politik yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Kepastian atas hak kepemilikan memberikan rasa aman dan jaminan hukum bagi individu maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan, mendorong aktivitas investasi, serta memperkuat efisiensi dalam proses produksi dan distribusi (Malau et al., 2025). Negara yang memiliki sistem peradilan yang efektif, independen, dan berfungsi secara optimal, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta penegakan hukum yang jelas dan tegas, pada umumnya mampu mencapai tingkat kesejahteraan

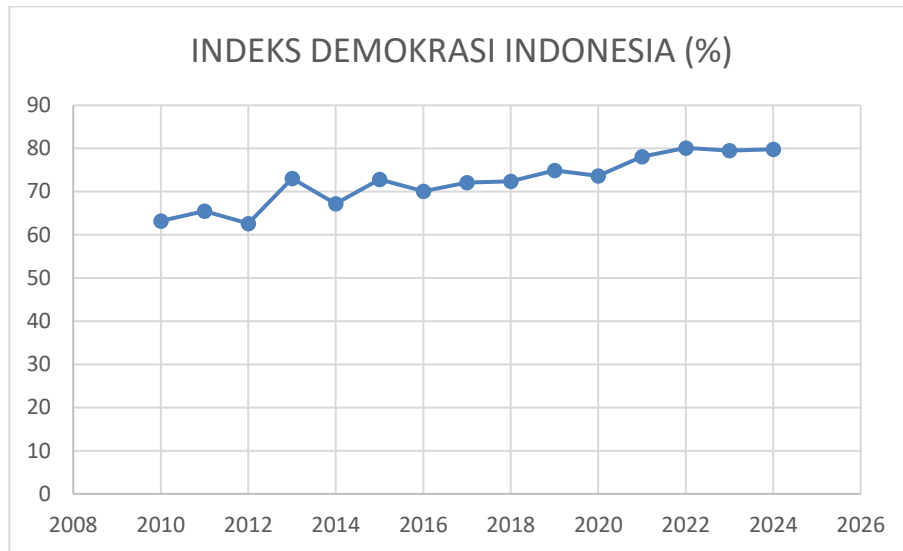
ekonomi yang lebih tinggi (Nurfadilla & Sahyana, 2024). Kondisi kelembagaan yang demikian menciptakan iklim usaha yang stabil, mengurangi ketidakpastian ekonomi, serta memperkuat legitimasi institusi negara di mata masyarakat dan pelaku ekonomi.

Sebaliknya, negara yang menghadapi kelemahan dalam sistem peradilan, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan, serta maraknya praktik korupsi cenderung mengalami berbagai hambatan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan politik yang ditandai oleh konflik kekuasaan, pergantian pemerintahan yang tidak berjalan secara konstitusional, maupun gejolak sosial-politik lainnya berpotensi menurunkan kepercayaan investor, mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka Panjang (Arifin & SH, 2024).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin menyadari dan terbuka terhadap pentingnya demokrasi bagi keberlangsungan suatu bangsa. Hal ini mendorong Badan Pusat Statistik untuk meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2007. IDI memuat nilai yang menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga aspek utama, yaitu Indeks Kebebasan Sipil (IKS), Indeks Hak Politik (IHP), dan Indeks Lembaga Demokrasi (ILD) (Malik et al., 2023). Melalui ketiga aspek tersebut, IDI memberikan gambaran penting mengenai kondisi perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan maupun pemerintah sebagai bahan evaluasi.

Gambar 1. 3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Tahun 2010-2024



Sumber: (Bps Indonesia, data diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.3, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) periode 2010–2023, dapat diketahui bahwa perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Hal ini mencerminkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih berlangsung dan belum sepenuhnya stabil. Pada periode 2010–2012, nilai IDI mengalami dinamika yang tidak konsisten, yaitu dari 63,17 pada tahun 2010 meningkat menjadi 65,48 pada tahun 2011, kemudian menurun menjadi 62,63 pada tahun 2012. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada fase awal tersebut, kualitas demokrasi masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun institusional, khususnya dalam aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.

Selanjutnya, pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 73,04, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, pada tahun 2014 nilai

IDI kembali mengalami penurunan menjadi 67,17. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik nasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap stabilitas demokrasi, sehingga konsistensi dalam kualitas demokrasi belum sepenuhnya terjaga. Pada periode 2015–2019, perkembangan IDI cenderung menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih stabil, meskipun masih disertai dengan penurunan pada tahun tertentu, seperti pada tahun 2016. Nilai IDI meningkat dari 72,82 pada tahun 2015 menjadi 74,92 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem demokrasi, baik dari sisi regulasi maupun praktik kelembagaan.

Memasuki periode 2020–2023, nilai IDI kembali menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022, IDI mencapai nilai tertinggi sebesar 80,14, yang mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi yang cukup signifikan. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 79,51. Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kembali mengalami peningkatan dari 79,51 pada tahun 2023 menjadi 79,81 pada tahun 2024. Meskipun demikian, secara umum capaian pada periode ini masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas demokrasi di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia selama periode 2010–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan yang disertai dengan fluktuasi. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan

variabel ekonomi seperti investasi dan partisipasi angkatan kerja, guna memahami peran stabilitas demokrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki kebaruan menggabungkan tiga variabel utama yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai faktor sosial, investasi yang diproksikan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai faktor ekonomi, serta stabilitas politik yang diproksikan melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pendekatan ini memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur stabilitas politik, yang masih relatif jarang digunakan dalam penelitian ekonomi pembangunan sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif atau indikator tata kelola pemerintahan secara umum, sehingga penggunaan IDI memberikan sudut pandang empiris yang lebih terukur dalam melihat hubungan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini juga mengisi kesenjangan studi terdahulu yang umumnya lebih berfokus pada Investasi dan jarang menguji peran TPAK serta stabilitas politik secara bersamaan. Di samping itu, masih terbatas penelitian yang menggunakan indikator demokrasi nasional sebagai ukuran kuantitatif stabilitas politik, serta yang memasukkan periode krisis dan pemulihan ekonomi dalam satu model analisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih menyeluruh mengenai determinan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang, fenomena empiris, serta data pendukung yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk

mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara Tingkat partisipasi Angkatan kerja, Investasi, dan indeks demokrasi Indonesia dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul penelitian “Pengaruh Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Stabilitas Politik Terhadap Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” sebagai fokus utama kajian ilmiah yang akan dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Apakah Stabilitas Politik yang di ukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Apakah Investasi, Tingkat partisipasi Angkatan kerja dan stabilitas politik secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditemukan dari latar belakang di atas tersebut dapat ditemukan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, investasi, dan stabilitas politik secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini setelah ditemukan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka ditemukan manfaat dalam penelitian ini. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan investasi, kualitas tenaga kerja, serta stabilitas politik guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang akan saya lakukan, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), investasi (PMDN dan PMA), serta Indeks Demokrasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik.
4. Periode waktu penelitian dibatasi pada tahun 2010–2024 dengan menggunakan pendekatan data time series.
5. Penelitian ini tidak memasukkan variabel lain yang juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan pengeluaran pemerintah.